

Relasi Kuasa dalam Novel *Pulang* Karya Leila S. Chudori Perspektif Michel Foucault

Nensilianti¹

Ridwan^{2*}

Atika Suri Ramadani³

¹²³ Universitas Negeri Makassar, Indonesia

¹nensilianti@unm.ac.id

²ridwan@unm.ac.id*

³sylvaticaaa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap relasi kuasa dalam novel *Pulang* karya Leila S. Chudori dengan menggunakan perspektif teori kekuasaan Michel Foucault. Fokus kajian diarahkan pada manifestasi kekuasaan melalui kontrol terhadap pikiran, tubuh, jaringan sosial, serta bentuk-bentuk resistensi. Novel ini merepresentasikan kehidupan eksil politik Indonesia pasca-1965 yang mengalami stigmatisasi dan represi negara. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis wacana kritis. Data dianalisis dengan mengidentifikasi representasi kuasa dalam teks serta mengkaitkannya dengan konteks sosial-politik yang melatarbelakanginya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuasaan dalam novel bersifat menyeluruh dan berlapis: mengontrol pikiran melalui penanaman rasa takut, mengatur tubuh melalui kekerasan dan pengasingan, serta menyebar melalui mekanisme jaringan sosial. Meski demikian, novel juga menghadirkan ruang-ruang perlawanan dan resistensi dari para tokohnya. Temuan ini menegaskan bahwa sastra dapat menjadi medium untuk mengkritik hegemoni kekuasaan sekaligus mengangkat dinamika sosial-politik yang tersembunyi dalam narasi sejarah.

Kata kunci: *analisis wacana kritis*, relasi kuasa, eksil politik, Michel Foucault

Pendahuluan

Karya sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cerminan dan kritik terhadap realitas sosial, politik, dan sejarah. Salah satu isu penting dalam kajian sastra adalah bagaimana relasi kekuasaan termanifestasi dalam teks dan membentuk identitas serta pengalaman karakter. Novel *Pulang* karya Leila S. Chudori menjadi contoh penting dalam mengkaji bagaimana kekuasaan dan resistensi hadir dalam konteks sejarah politik Indonesia pasca-1965 (Haryanti, 2021).

Sastra adalah hasil dari imajinasi yang tidak sepenuhnya bersifat fiktif, karena sering kali mencerminkan pengamatan penulis terhadap kehidupan di sekitarnya (Budianta, 2002). Dengan demikian, karya sastra dapat dilihat sebagai “rekaman” dari realitas sosial masyarakat pada waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, karya sastra sering dianggap sebagai dokumen sosial. Selain sebagai bahan bacaan karya sastra juga mampu merekam dan menceritakan sebuah sejarah yang pernah terjadi (Nensilianti, dkk, 2023).

Novel *Pulang* mengisahkan perjalanan hidup seorang tokoh bernama Dimas Suryo, seorang eksil politik Indonesia, yang terjebak dalam situasi sejarah kelam pasca-peristiwa 30 September 1965. Dimas, bersama dengan tiga temannya, Nugroho, Risjaf, dan Tjai, melarikan diri ke Paris dan mendirikan Restoran Tanah Air sebagai bentuk pelestarian identitas mereka di tengah pengasingan. Dalam latar belakang revolusi

mahasiswa di Paris pada Mei 1968, Dimas menerima kabar tragis mengenai sahabatnya, Hananto Prawiro, yang ditangkap dan dieksekusi oleh pemerintah Indonesia. Cerita berlanjut ke Mei 1998, ketika putri Dimas, Lintang Utara, kembali ke Indonesia untuk merekam pengalaman keluarga korban tragedi 1965 sebagai tugas akhir kuliahnya. Melalui penelusuran Lintang, novel ini tidak hanya mengungkap masa lalu ayahnya tetapi juga mengaitkan sejarah berdarah Indonesia dengan kerusuhan Mei 1998. Dengan gaya naratif yang kaya dan karakter-karakter yang mendalam, *Pulang* menyajikan refleksi tentang identitas, kehilangan, dan harapan dalam menghadapi kekuasaan yang menindas.

Foucault (dalam Hussen, 2023) menyatakan bahwa kekuasaan bersifat *omnipresent*, bukan karena mencakup segala sesuatu, tetapi karena ia mengalir melalui hubungan sosial yang membentuk kategori-kategori yang mengatur perilaku, seperti norma baik dan buruk. Kekuasaan tidak dapat diperoleh, dirampas, atau dibagi; ia berfungsi melalui berbagai elemen yang tak terhitung dan dalam relasi yang tidak setara serta dinamis. Hubungan-hubungan kekuasaan bersifat terbuka dan saling mempengaruhi dengan relasi lainnya.

Dalam novel *Pulang*, kekuasaan tidak hanya hadir melalui institusi formal seperti rezim Orde Baru, tetapi melalui narasi dan pengalaman yang dialami oleh para karakter, khususnya eksil politik yang terasing akibat peristiwa G30S/PKI 1965. Pengetahuan tentang sejarah politik dan sosial menjadi alat bagi para karakter untuk memahami posisi mereka dalam masyarakat sekaligus menyadari ketidakadilan yang terjadi. Hal ini mencerminkan gagasan Foucault (dalam Arifudin 2019:2) bahwa tidak ada pengetahuan tanpa kekuasaan, dan sebaliknya, tidak ada kekuasaan tanpa pengetahuan.

Foucault (dalam Kebung, 2017) mengungkapkan bahwa kekuasaan hadir karena adanya hubungan dominasi: terdapat pihak yang mengendalikan dan pihak yang dikendalikan. Dalam *Pulang*, negara digambarkan sebagai entitas yang menggunakan kekuasaan untuk mengontrol pemikiran, tubuh, dan identitas individu melalui represi politik dan pengasingan. Karakter-karakter dalam novel ini tidak hanya menjadi korban dominasi negara tetapi juga menunjukkan bentuk resistensi terhadap kekuasaan.

Foucault (dalam Kusuma, 2023) menyatakan bahwa di mana terdapat kekuasaan, selalu ada perlawanan. Pusat perlawanan ini muncul di berbagai tempat bersamaan dengan adanya sumber kekuasaan. Namun, ada juga jenis perlawanan tertentu yang bersifat khusus, seperti perlawanan yang spontan, liar, hasil dari kolusi, tanpa kompromi, bermotif, atau bahkan yang bersedia untuk berkorban.

Selaras dengan itu, Foucault (dalam Mudhoffir, 2013) menegaskan bahwa di mana terdapat kekuasaan, di situ juga terdapat anti-kekuasaan; resistensi tidak terpisahkan dari relasi kekuasaan itu sendiri. Pernyataan ini menegaskan bahwa resistensi adalah bagian integral dari dinamika kekuasaan. Ketika kekuasaan berfungsi untuk mengontrol atau mendominasi, individu atau kelompok yang tertekan akan mencari cara untuk melawan dan menentang struktur tersebut. Dengan demikian, relasi kuasa dan resistensi saling terkait dan membentuk suatu siklus yang dinamis dalam masyarakat.

Foucault, seperti yang disederhanakan oleh Bambang Sugiharto (dalam Antomo, 2013:40), menekankan bahwa relasi kekuasaan berfungsi sebagai dasar pemikiran masyarakat pada periode tertentu. Dalam novel ini menggambarkan bagaimana masyarakat Indonesia diatur dan dikendalikan oleh berbagai bentuk kekuasaan, terutama dalam konteks sejarah dan politik pasca-revolusi. Dalam *Pulang* karakter-karakter mengalami stigmatisasi dan dominasi oleh kekuasaan yang beroperasi dalam bentuk institusi sosial dan politik. Misalnya, pengalaman para tokoh yang terpaksa meninggalkan tanah air mereka mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dapat

mengatur kehidupan individu, membentuk cara berpikir mereka, serta memengaruhi identitas dan relasi sosial mereka.

Kekuasaan dalam hubungan-hubungan tersebut disebarkan melalui media yang dikenal sebagai wacana. Menurut Foucault, wacana adalah cara untuk menghasilkan pengetahuan, yang diiringi oleh praktik sosial, bentuk subjektivitas yang muncul darinya, serta relasi kekuasaan yang mendasari pengetahuan dan praktik sosial tersebut. Semua aspek ini saling terkait satu sama lain. Berbagai bentuk operasi kekuasaan, baik yang tampak jelas maupun yang sulit dikenali, termasuk dalam apa yang ia sebut sebagai praksis kultural secara umum, yaitu diskursus (dalam Nasution, 2024:198).

Novel *Pulang* banyak mencertitakan tentang relasi kuasa, elemen kekuasaan, serta bentuk perlawanan (*counter discourse*) yang disebarkan melalui wacana menurut Michel Foucault. Wacana-wacana tersebut ditemukan dalam beberapa kutipan novel *Pulang*, yang mencerminkan empat media penyebar kekuasaan sesuai dengan teori relasi kuasa Michel Foucault. Yaitu relasi kuasa atas pikiran, tubuh, unsur kekuasaan, dan resistensi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Suhaila Yasaroh Nasution (2024:197-208) melalui artikel yang berjudul "Relasi Kuasa dalam Novel *Rindu Kubawa Pulang* Karya S. Baya: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault" yang terbit di Jurnal Al-Furqan. Penelitian tersebut mengkaji bentuk-bentuk relasi kuasa yang membentuk diskursus dalam novel *Rindu Kubawa Pulang*, dengan menyoroti perjuangan tokoh utama dalam menghadapi konflik warisan dan posisinya di masyarakat setelah kembali dari perantauan. Penelitian ini menggunakan teori relasi kuasa Michel Foucault, yang menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat terstruktur, tetapi juga dapat mendominasi, mengontrol, menstigmatisasi, dan memanipulasi melalui pikiran dan tubuh. Penelitian ini menyoroti bagaimana kekuasaan beroperasi melalui wacana, serta adanya resistensi sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus relasi kuasa dan resistensi dalam novel tersebut tersebar melalui empat media penyebar kuasa, yaitu agama, budaya, politik-ideologi, dan institusi, yang semuanya membentuk relasi kuasa atas pemikiran.

Jika dibandingkan dengan penelitian ini yang menganalisis novel *Pulang* karya Leila S. Chudori, terdapat beberapa aspek kebaruan yang dapat diidentifikasi. Penelitian yang digunakan penulis kali ini adalah novel *Pulang*, yang belum pernah dianalisis secara mendalam menggunakan teori relasi kuasa Foucault, sementara penelitian Nasution berfokus pada novel *Rindu Kubawa Pulang*. Penelitian ini menawarkan pemetaan yang lebih spesifik terhadap empat media penyebar kuasa menurut Foucault, yaitu relasi kuasa atas pikiran, tubuh, unsur kekuasaan, dan resistensi, yang diidentifikasi secara eksplisit dalam narasi dan kutipan novel *Pulang*.

Penelitian ini juga menyoroti keterkaitan antara diskursus kekuasaan dengan ideologi yang terbentuk dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, serta bagaimana narasi sejarah dan trauma politik membentuk identitas dan perlawanan karakter-karakternya. Hal ini memberikan kontribusi baru dalam kajian sastra Indonesia, khususnya dalam mendorong pemikiran kritis terhadap kekuasaan dan relasinya dengan pengetahuan dan identitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas cakupan kajian relasi kuasa dalam sastra Indonesia, tetapi juga menghadirkan analisis yang lebih mendalam dan terstruktur mengenai bagaimana kekuasaan dan resistensi beroperasi dalam narasi, karakter, dan wacana sosial-politik yang diangkat oleh Leila S. Chudori dalam novel *Pulang*. Penelitian ini diharapkan dapat

membuka perspektif baru dalam memahami dinamika kekuasaan dalam karya sastra, serta memperkaya diskursus kritis di lingkungan akademik Sastra Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis wacana kritis berdasarkan teori Foucault (dalam Faruk, 2012:216-264). Subjek penelitian adalah teks novel *Pulang* karya Leila S. Chudori sebagai sumber data utama. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2016:19) dalam pengumpulan data melalui teknik membaca mendalam (simak) dan pencatatan elemen-elemen yang relevan dengan relasi kuasa dalam novel (Nafila, 2021:338). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis wacana kritis dengan tahapan pengkategorian tema kekuasaan, identifikasi manifestasi kuasa dalam pikiran, tubuh, dan jaringan sosial, serta interpretasi implikasi sosial-politik yang melatarbelakangi cerita. Proses analisis ini dilakukan secara sistematis untuk mengungkap dinamika relasi kuasa dan resistensi dalam novel. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap bagaimana kekuasaan beroperasi dan berdampak dalam konteks sejarah Indonesia pasca-1965.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi kuasa dalam *Pulang* bersifat multidimensi: mengontrol pikiran melalui ketakutan, mengatur tubuh melalui kekerasan, dan menyebar melalui jaringan sosial. Namun, novel ini juga menawarkan ruang bagi resistensi melalui upaya rekonstruksi ingatan kolektif. Temuan ini memperkaya studi sastra Indonesia dengan perspektif Foucault, sekaligus menegaskan bahwa sastra bisa menjadi medium kritik terhadap hegemoni kekuasaan.

Relasi Kuasa atas Pikiran

Pada kutipan berikut menunjukkan bagaimana kekuasaan mengontrol pikiran masyarakat melalui ketakutan dan norma sosial yang berlaku:

Data 1

"Sekali lagi Ibu menekankan sebaiknya Mas Dimas tetap di Eropa saja. Kami sudah merasa lebih tenang di Jakarta. Perburuan semakin mengganas, bukan hanya pada mereka yang dianggap komunis, atau ramah kepada PKI. Kini keluarga atau sanak famili pun kena ciduk. Ada yang dikembalikan, ada yang hilang begitu saja, ada yang dihanyutkan ke sungai" (Leila, 2012: 19).

Kutipan dari novel *Pulang* karya Leila S. Chudori menggambarkan bagaimana kekuasaan pasca-1965 di Indonesia bekerja secara menyebar dan menembus hingga ke ranah pribadi, sebagaimana dijelaskan dalam teori kekuasaan Michel Foucault. Kekuasaan tidak lagi hanya menargetkan individu yang secara langsung terlibat atau diduga berafiliasi dengan PKI, tetapi juga meluas kepada keluarga dan kerabat mereka. Hal ini mencerminkan konsep kekuasaan menurut Foucault yang tidak bersifat vertikal dan sentralistik, melainkan bekerja dalam jaringan relasi sosial, menyusup melalui struktur keluarga, pergaulan, dan komunitas. Pernyataan Ibu yang menyarankan Dimas tetap di Eropa menunjukkan bagaimana kekuasaan menciptakan kondisi psikologis berupa ketakutan, kecemasan, dan rasa tidak aman, sehingga individu mulai mengatur dirinya sendiri untuk menyesuaikan dengan norma yang diharapkan oleh kekuasaan. Dalam konteks ini, kekuasaan telah berhasil memproduksi subjektivitas yang patuh

melalui mekanisme pengawasan dan teror. Selain itu, kekuasaan juga tampak dalam bentuk kekerasan yang ekstrem, seperti penangkapan tanpa alasan, penghilangan orang secara misterius, hingga pembunuhan yang tidak dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan bentuk kontrol atas tubuh dan hidup individu, yang dalam perspektif Foucault disebut sebagai bentuk kekuasaan biopolitik, yaitu kekuasaan yang mengatur siapa yang berhak hidup dan siapa yang boleh dimatikan. Dengan demikian, kutipan tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam novel *Pulang* tidak hanya represif, tetapi juga membentuk perilaku, ketakutan, dan pilihan hidup tokoh-tokohnya melalui mekanisme sosial dan simbolik yang halus namun efektif.

Pemikiran Foucault (dalam Susanti dkk., 2022) menegaskan bahwa negara berfungsi sebagai superstruktur yang terhubung dengan berbagai jaringan kekuasaan, memengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti tubuh, seksualitas, dan hubungan sosial. Dalam konteks ini, ketakutan menjadi alat yang efektif untuk mengendalikan pikiran warganya. Kekuasaan tidak bersifat terpusat, melainkan tersebar dalam jaringan sosial dan beroperasi melalui wacana dominan yang membentuk cara berpikir masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa relasi kuasa tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif, karena menghasilkan pengetahuan dan identitas yang memengaruhi perilaku serta pandangan masyarakat. Kenyataan lainnya tergambar ke dalam kutipan di bawah ini.

Data 2

"Begini. Kau harus ingat betul, karena Ayah dianggap bagian dari 'perzinahan politik' bersama PKI atau Lekra atau entah kelompok mana, maka kesalahan itu memanjang terus melampaui generasi Ayah. 'Dosa politik' itu bisa atau pasti ditempelkan kepadamu, di dahimu. Mudah-mudahan tidak sampai meluncur ke anakmu" (Leila, 2012: 234).

Kutipan ini menunjukkan bahwa kekuasaan bersifat produktif dan tidak hanya represif; ia menciptakan realitas sosial melalui produksi pengetahuan dan wacana yang mengatur perilaku individu secara halus dan sistematis. Dalam kutipan "dosa politik" yang melekat pada seseorang karena hubungan keluarganya dengan kelompok yang dianggap bermasalah secara politik menunjukkan bagaimana kekuasaan memproduksi identitas dan stigma yang diwariskan secara sosial (Foucault, 2017).

Hal ini mencerminkan bagaimana wacana kekuasaan membentuk kebenaran sosial yang melekat pada individu bukan hanya berdasarkan tindakan pribadi, melainkan juga berdasarkan hubungan sosial dan sejarah keluarganya. Kekuasaan menciptakan suatu rezim pengetahuan yang mengkonstruksi siapa yang dianggap bersalah atau bersih secara politik, dan stigma ini menjadi sebuah realitas sosial yang mengatur perilaku dan peluang hidup individu dan generasi berikutnya. Kekuasaan tidak hanya menindas secara langsung, tetapi juga bekerja melalui mekanisme normalisasi dan produksi pengetahuan yang menghasilkan efek diskriminasi dan pengucilan yang berkelanjutan secara sistematis. Ini adalah contoh bagaimana kekuasaan Foucaultian beroperasi dalam relasi sosial yang luas dan berkelanjutan, mengatur identitas dan hubungan antar generasi melalui wacana dan pengetahuan yang diproduksi oleh institusi dan praktik sosial

Data 3

"Aji tahu betul untuk masuk ke dalam sebuah perusahaan milik negara harus melalui birokrasi yang luar biasa yang memastikan calon pegawainya betul-betul"

bebas dari 'kekotoran' hubungan darah dengan tahanan politik atau eksil politik" (Leila, 2012: 341).

Kutipan tersebut mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam ranah kehidupan sehari-hari melalui mekanisme pengawasan dan normalisasi, sebagaimana dikemukakan oleh Michel Foucault. Dalam konteks ini, kekuasaan negara pasca-1965 tidak hanya melakukan represi secara langsung terhadap para tahanan politik dan eksil, tetapi juga memperluas kontrolnya hingga ke tubuh sosial masyarakat melalui sistem birokrasi yang ketat dan diskriminatif. Proses seleksi pegawai di perusahaan milik negara yang mewajibkan "kebersihan" dari hubungan darah dengan tahanan atau eksil politik menunjukkan bagaimana kekuasaan menciptakan norma-norma sosial-politik tertentu yang kemudian dijadikan alat untuk menyaring, mengecualikan, dan mengontrol individu. Ini sejalan dengan konsep bio-power dalam teori Foucault, di mana kekuasaan mengatur kehidupan melalui kebijakan administratif dan institusi sosial, bukan semata-mata melalui kekerasan.

Dalam hal ini, birokrasi bertindak sebagai alat pendisiplinan yang mengawasi dan menilai latar belakang individu, sehingga status sosial-politik seseorang tidak lagi hanya ditentukan oleh tindakan pribadi, tetapi juga oleh asal-usul dan afiliasi keluarga. Kekuasaan tidak hanya menghukum, tetapi juga mengatur siapa yang berhak diterima dan siapa yang disingkirkan, bahkan sebelum pelanggaran terjadi. Dengan demikian, kutipan ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan Foucauldian bekerja secara halus namun sistematis untuk mengontrol siapa yang dapat berpartisipasi dalam sistem sosial, serta bagaimana ingatan kolektif dan stigma politik dijadikan instrumen pengendalian dalam struktur sosial-birokratis. Menurut Foucault (2002), negara bukan hanya institusi yang memonopoli kekuasaan secara langsung, melainkan merupakan superstruktur yang beroperasi melalui jaringan kekuasaan yang tersebar dan mengatur berbagai bidang kehidupan secara halus dan sistematis. Dalam konteks kutipan di atas, birokrasi perusahaan milik negara berfungsi sebagai mekanisme kekuasaan yang mengontrol dan mengawasi calon pegawai tidak hanya dari segi kompetensi, tetapi juga dari aspek hubungan sosial dan sejarah keluarganya.

Kekuasaan tidak hanya hadir sebagai dominasi eksplisit, tetapi juga sebagai praktik pemerintahan (*governmentality*) yang memanifestasikan dirinya dalam regulasi sosial dan normalisasi yang melekat pada institusi negara. Kekuasaan ini memproduksi realitas sosial yang mengatur akses individu ke posisi dalam struktur negara, sekaligus menjaga hegemoni politik melalui kontrol terhadap hubungan sosial dan sejarah keluarga calon pegawai.

Data 4

"Tentang bagaimana pemerintah Orde Baru begitu perkasanya bisa terus-menerus menghidupkan imaji kejahatan musuhnya dan berhasil menumbuhkan serta menyuburkan kebencian masyarakat terhadap hantu bernama komunisme. Bagaimana semua literatur asing mencoba mengungkap teori siapa sesungguhnya di belakang peristiwa ini" (Leila, 2012: 369).

Kekuasaan dalam pandangan Foucault tidak terpusat pada satu entitas, melainkan tersebar dan beroperasi melalui praktik-praktik normalisasi dan regulasi yang menghasilkan dan mempertahankan rezim kebenaran tertentu. Dengan demikian, pemerintah Orde Baru berhasil mengontrol narasi politik dan sosial melalui produksi pengetahuan yang melekat pada kekuasaan, sehingga masyarakat menerima dan menginternalisasi kebencian terhadap komunisme sebagai sesuatu yang normal dan benar. Menurut Foucault (2013), kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga

produktif dan menyebar melalui institusi seperti media, pendidikan, dan agama yang membentuk diskursus atau wacana yang mengatur cara masyarakat memahami dunia. Dalam konteks Orde Baru, pemerintah menggunakan media dan institusi lain untuk memproduksi dan mereproduksi kebenaran bahwa komunisme adalah musuh yang harus dilawan, sehingga membentuk pengetahuan dan persepsi publik yang mendukung kekuasaannya.

Relasi Kuasa atas Tubuh

Relasi kuasa atas tubuh digambarkan melalui kekerasan fisik yang dilakukan secara sistematis terhadap korban. Hal ini terlihat dari kutipan berikut:

Data 5

"Di tahanan ini, Ibu ditanya terus-menerus. Setiap hari. Sampai capek. Sampai kedua mata Iubengkak dan wajahnya kehitaman. Sementara Ibu ditanya dari pagi sampai malam, saya mendapat tugas menyapu, membersihkan beberapa ruangan setiap pagi" (Leila, 2012: 22).

Kutipan ini menggambarkan pengalaman penyiksaan fisik dan pengawasan ketat terhadap seorang ibu yang ditahan, serta pembagian tugas yang mengatur aktivitas anaknya di lingkungan tahanan. Jika dianalisis menggunakan pandangan Foucault tentang politik tubuh, khususnya anatomo-politik dan biopolitik, situasi ini mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja langsung pada tubuh individu melalui disiplin dan pengawasan.

Menurut Foucault (dalam Nasution, 2024:203-204), anatomo-politik mengatur tubuh individu sebagai mesin produktif melalui praktik disiplin yang ketat, seperti pengawasan terus-menerus dan kontrol aktivitas sehari-hari. Dalam kasus ini, penyiksaan fisik yang menyebabkan mata bengkak dan wajah kehitaman adalah bentuk kekerasan fisik yang sekaligus merupakan cara kekuasaan menundukkan dan mengendalikan tubuh tahanan. Sementara itu, tugas menyapu dan membersihkan ruangan yang diberikan kepada anaknya juga merupakan bentuk pengaturan perilaku yang menginternalisasi kepatuhan dalam tubuh sosial.

Biopolitik yang mengatur populasi melalui intervensi biologis dan sosial juga terlihat dalam konteks tahanan yang memperlihatkan kontrol negara atas tubuh individu, bukan hanya secara fisik tetapi juga melalui regulasi aktivitas dan peran sosial. Tubuh dalam tahanan menjadi media utama kekuasaan yang dipertontonkan melalui kekerasan, pengawasan, dan pembatasan aktivitas, sesuai dengan konsep Foucault bahwa tubuh adalah medan pertarungan relasi kuasa. Kenyataan lainnya tergambar dalam kutipan di bawah ini.

Data 6

"Om, semula saya tidak tahu fungsi ruangan itu. Awalnya saya hanya membuang abu dan puntung rokok saja. Tetapi keesokan harinya saya harus mengepel bekas darah kering yang melekat di lantai. Saya yakin banyak sekali yang disiksa di sini karena saya mendengar suara jeritan orang-orang. Laki-laki, perempuan. Banyak sekali. Bergantian" (Leila, 2012: 22).

Kekerasan fisik ini tidak hanya menghancurkan tubuh korban tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk menciptakan trauma kolektif dan mendisiplinkan masyarakat melalui ketakutan. Mengacu pada konsep disciplinary power dari Foucault, ruangan penyiksaan ini menggambarkan bagaimana tubuh direduksi menjadi objek kontrol melalui siksaan fisik.

Foucault (dalam Jumiati dkk., 2024) menjelaskan bahwa biopower beroperasi secara menyeluruh, mengatur kehidupan sehari-hari dan tubuh individu untuk membentuk masyarakat yang lebih disiplin. Kekerasan ini tidak hanya merusak fisik tetapi juga berfungsi sebagai strategi politik untuk menghapus resistensi dan menciptakan ketakutan kolektif. Dalam konteks ini, relasi kuasa menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja melalui normalisasi tindakan represif untuk mempertahankan stabilitas sosial dan ideologis. Selain itu, tindakan represif lainnya terlihat dalam kutipan berikut:

Data 7

"Tapi kami juga mendengar banyak korban yang langsung diciduk dan ditebas di jalan, di hutan, di tepi sungai, atau di pinggir jurang" (Leila, 2012: 74).

Tindakan ini menunjukkan tindakan represif di mana individu dijadikan objek kontrol yang lebih luas. Praktik pencidukan dan pembunuhan di ruang publik menegaskan dominasi ideologi penguasa atas tubuh individu. Relasi kuasa ini tidak hanya bersifat represif tetapi juga produktif, menghasilkan pengetahuan dan identitas yang memengaruhi perilaku masyarakat. Dengan demikian, relasi kuasa atas tubuh mencerminkan bagaimana kekuasaan beroperasi dalam struktur sosial yang lebih besar, menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menegakkan kontrol dan disiplin dalam masyarakat.

Unsur Kekuasaan

Relasi kekuasaan juga terlihat dalam interaksi sosial sehari-hari, seperti dalam kutipan berikut:

Data 8

"Nganu, Dimas... kalau tahun ini kau mengajukan permohonan visa lagi, mbok sebut saja namaku... mudah-mudahan bisa membantu masuk Indonesia" (Leila, 2012: 125).

Kutipan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan tersebar melalui jaringan sosial dan hubungan personal. Penggunaan nama sebagai referensi mencerminkan legitimasi sosial yang dapat membuka akses ke sistem birokrasi negara. Kekuasaan dan kepemimpinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan tingkat pengetahuan atau kecerdasan dari penguasa atau pemimpin tersebut (Latupeirissa, 2021). Secara umum, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber daya mereka demi mencapai tujuan tertentu. Pengetahuan atau kecerdasan berfungsi sebagai sumber kekuatan dalam memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, kecerdasan moral yang berkaitan dengan etika juga berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kekuasaan tersebut.

Relasi kekuasaan meresap dalam jaringan sosial, di mana individu memanfaatkan hubungan personal untuk mengakses sistem birokrasi negara. Sejalan dengan pandangan Foucault (dalam Nasution, 2024) bahwa kekuasaan tidak terpusat pada negara, melainkan tersebar melalui interaksi sosial yang kompleks, kutipan ini menggambarkan bagaimana individu menggunakan nama sebagai referensi untuk membuka akses ke sistem birokrasi. Kekuasaan beroperasi secara halus melalui legitimasi sosial dan personal, menunjukkan bagaimana struktur sosial dan politik dinormalisasi dalam praktik sehari-hari.

Resistensi

Resistensi terhadap kekuasaan muncul dalam bentuk kritik terhadap sistem Orde Baru yang korup dan represif:

Data 9

"Sedangkan kelas menengah yang tercipta selama era Orde Baru ini adalah kelas yang sebetulnya mempunyai pilihan untuk menjadi kritis; yang seharusnya mampu mempertanyakan perangkat Orde Baru yang sudah tak mempunyai logika saking korupnya" (Leila, 2012: 288-289).

Kutipan ini menunjukkan Resistensi terhadap kekuasaan Orde Baru muncul sebagai tanggapan kritis terhadap sistem yang korup dan represif. Dalam kutipan di atas, dinyatakan bahwa kelas menengah memiliki potensi untuk mengembangkan kritik terhadap kekuasaan, meskipun mereka terjebak dalam jaringan relasi kekuasaan yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan ketidakadilan, tantangan bagi kelas menengah adalah mengatasi batasan-batasan yang diciptakan oleh kekuasaan Orde Baru. Foucault (dalam Sholikhah, 2020) menekankan bahwa di mana ada kekuasaan, terdapat juga anti-kekuasaan; resistensi tidak terpisahkan dari relasi kekuasaan itu sendiri.

Perluasan Monumen menjadi Museum Pengkhianatan PKI mencerminkan upaya pemerintah untuk mendiskreditkan sejarah dan mengontrol narasi publik. Dalam konteks ini, resistensi dapat muncul dalam bentuk penolakan terhadap interpretasi resmi dan upaya untuk merekonstruksi ingatan kolektif. Meskipun kelas menengah memiliki kapasitas untuk bersikap kritis, mereka sering kali terhalang oleh kondisi sosial dan ekonomi yang tidak mendukung, seperti krisis moneter dan kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

Kondisi ini menciptakan tekanan tambahan bagi kelas menengah untuk bertindak, sehingga meskipun terdapat potensi resistensi, realitas politik dan sosial sering kali membatasi ruang gerak mereka. Dengan demikian, resistensi kelas menengah ini mencerminkan kesadaran akan ketidakadilan yang ada, namun berbagai faktor eksternal sering kali menghalangi mereka untuk mengambil tindakan yang lebih berani dalam menghadapi kekuasaan yang otoriter. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998 menjadi bukti bahwa desakan dan kritik dari masyarakat termasuk kelas menengah akhirnya mampu menggoyahkan legitimasi rezim tersebut, meskipun perjalanan menuju resistensi tersebut penuh dengan tantangan dan risiko. Kenyataan lainnya tergambar dalam kutipan di bawah ini.

Data 10

"Pertama, aku mendapat info dari kawan-kawan Malaysia, mereka mendengar bahwa ada aktivis Indonesia yang diculik, Pius Lustrilanang, mengadakan konferensi pers dan menceri- takan bagaimana ia diculik dan disiksa" (Leila, 2012: 127).

Kutipan ini menceritakan tentang aktivis Indonesia, Pius Lustrilanang, yang diculik dan disiksa serta mengadakan konferensi pers untuk menceritakan pengalamannya, dapat dianalisis melalui pandangan Foucault tentang resistensi sebagai bagian dari relasi kekuasaan. Sejalan dengan pandangan Foucault (dalam Nasution, 2024), resistensi bukanlah sesuatu yang terpisah dari kekuasaan, melainkan selalu muncul di dalam relasi kekuasaan itu sendiri dan dalam berbagai bentuk, tidak selalu berupa aksi besar atau ideologi jelas. Dalam konteks ini, tindakan Pius yang menceritakan pengalaman penculikan dan penyiksaan adalah bentuk resistensi

terhadap kekuasaan yang menindasnya. Dengan membongkar praktik kekerasan tersebut ke publik, Pius menantang narasi kekuasaan yang berusaha menyembunyikan atau menormalisasi tindakan represif tersebut.

Resistensi ini merupakan bagian dari dinamika kekuasaan yang bersifat produktif dan terus-menerus berinteraksi dalam relasi sosial; kekuasaan selalu memunculkan anti-kekuasaan (*resistance*) yang berperan sebagai penyeimbang dan pengubah relasi tersebut. Oleh karena itu, pengungkapan pengalaman penderitaan ini bukan hanya tindakan melawan secara simbolik, tetapi juga upaya mendestabilisasi dan mengubah praktik kekuasaan yang represif. picture.

Pembahasan

Relasi kuasa dalam novel *Pulang* sangat kompleks dan meresap ke berbagai aspek kehidupan tokohnya. Kekuasaan tidak hanya hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi juga melalui kontrol pikiran dan pengaturan perilaku sehari-hari. Ketakutan kolektif yang ditanamkan melalui narasi ancaman, stigma politik yang diwariskan lintas generasi, serta birokrasi yang menyeleksi individu berdasarkan sejarah keluarganya, menjadi bukti bahwa kekuasaan bekerja secara halus dan sistematis. Melalui mekanisme ini, masyarakat tidak hanya dikendalikan secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial.

Novel ini menampilkan bagaimana kekuasaan membentuk identitas dan realitas sosial melalui produksi pengetahuan dan wacana yang mendominasi. Stigma dan label politik yang melekat pada individu atau keluarganya menciptakan diskriminasi yang berkelanjutan. Proses ini tidak hanya menindas secara langsung, tetapi juga menghasilkan normalisasi perilaku dan pandangan yang mendukung keberlanjutan kekuasaan. Bahkan, akses terhadap pekerjaan dan posisi sosial diatur sedemikian rupa agar hanya individu yang dianggap bersih secara politik yang dapat diterima.

Kekuasaan juga meresap melalui jaringan sosial dan hubungan personal. Penggunaan nama atau referensi sosial untuk memperoleh akses ke birokrasi negara menunjukkan bahwa kekuasaan tidak hanya terpusat pada institusi formal, tetapi juga tersebar dalam interaksi sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa relasi kuasa tidak selalu bersifat vertikal, tetapi juga horizontal, di mana individu memanfaatkan hubungan sosial sebagai strategi untuk bertahan atau memperoleh keuntungan.

Novel *Pulang* juga menghadirkan ruang bagi resistensi. Kritik terhadap sistem yang korup dan represif, upaya merekonstruksi ingatan kolektif, hingga tindakan individu seperti mengungkap pengalaman penyiksaan, menjadi bentuk perlawanan terhadap hegemoni kekuasaan. Resistensi ini tidak selalu bersifat frontal, melainkan sering muncul dalam bentuk kritik, penolakan terhadap narasi resmi, atau upaya membongkar kebenaran yang disembunyikan. Meskipun ruang gerak untuk resistensi sering kali terbatas oleh tekanan sosial dan politik, keberadaannya tetap menjadi bagian penting dalam dinamika relasi kuasa.

Novel *Pulang* berhasil menampilkan bagaimana kekuasaan bekerja secara multidimensi-mengontrol pikiran, mengatur tubuh, dan menyebar melalui jaringan sosial-namun juga membuka peluang bagi resistensi. Melalui narasi dan penggambaran tokoh-tokohnya, novel ini menjadi medium kritik sosial yang efektif, sekaligus memperkaya khazanah studi sastra Indonesia dengan perspektif baru tentang kekuasaan dan perlawanan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap novel *Pulang* karya Leila S. Chudori, dapat disimpulkan bahwa relasi kekuasaan dalam novel ini bersifat multidimensi, meliputi kontrol atas pikiran melalui penanaman rasa takut dan stigma, pengaturan tubuh melalui kekerasan dan pengasingan, serta penyebaran kekuasaan melalui jaringan sosial dan birokrasi. Kekuasaan negara tidak hanya hadir secara represif melalui tindakan langsung, tetapi juga bekerja secara halus melalui wacana, norma sosial, dan birokrasi yang membentuk identitas serta pengalaman para karakter, khususnya eksil politik dan keluarganya. Namun demikian, novel ini juga menunjukkan adanya ruang resistensi, di mana karakter-karakternya berupaya merekonstruksi ingatan kolektif dan melawan narasi dominan negara, sejalan dengan pemikiran Foucault bahwa di mana ada kekuasaan, di situ pula selalu ada perlawanan. Penelitian ini memperkaya khazanah kajian sastra Indonesia dengan menawarkan analisis kritis berbasis teori relasi kuasa Foucault, serta menyoroti pentingnya sastra sebagai medium kritik sosial dan refleksi atas sejarah politik bangsa.

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu novel dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bersifat interpretatif, sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati. Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat melakukan studi komparatif dengan novel-novel lain bertema serupa untuk melihat pola relasi kekuasaan yang lebih luas dalam sastra Indonesia. Penelitian juga dapat memperdalam kajian dengan mengangkat isu gender atau mengombinasikan pendekatan interdisipliner, seperti sejarah, sosiologi, dan studi trauma, guna memperkaya pemahaman tentang dinamika kekuasaan dan identitas dalam konteks sosial-politik Indonesia. Selain itu, analisis terhadap karya sastra diaspora juga dapat menjadi alternatif untuk menelusuri bentuk-bentuk resistensi kultural yang lebih beragam. Dengan demikian, diharapkan penelitian mendatang dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman mengenai relasi kuasa, resistensi, serta konstruksi identitas dalam karya sastra Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ayuningtiyas, R. (2019). Relasi kuasa dalam novel anak rantau karya Ahmad Fuadi: kajian teori Michel Foucault. *Sarasvati*, 1(1), 73-86. <http://dx.doi.org/10.30742/sv.v1i1.657>
- Antomo, Cahyo Waskito Pur. 2013. "Relasi Kuasa dalam Novel Merajut Harkat Karya Putu Oka Sukanta". Skripsi tidak diterbitkan. Yogyakarta: UNY.
- Arifudin, M. U. (2019). Relasi Kuasa Dalam Novel Canting Karya Arswendo Atmowiloto (Kajian Michel Foucault). *Sapala*.
- Budianta, Melani. A. (2002). *Membaca Sastra*. Magelang: Indonesia Tera.
- Chudori, L. (2012). *Pulang*. Bogor: PT Grafika Mardi Yuana
- Faruk, H. T. (2012). *Metode penelitian sastra: sebuah penjelajahan awal*. Pustaka Pelajar. Chicago
- Foucault, M. (2017). *Power/Knowledge*. Yogyakarta: Narasi-Pustaka Prometheus.
- Foucault, M. (2002). *Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan, terj. Rahayu S. Hidayat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Foucault, M. (2013). *Arkeologi Pengetahuan*. Yogyakarta: BasaBasi.
- Haryanti, N. D. (2021). Kekerasan Rezim Orde Baru Dalam Cerpen Indonesia Modern Serta Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia Di Sma/Ma (*Bachelor's thesis*, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Hussen, M. (2023). Relasi kekuasaan masyarakat Aceh dalam novel Tanah Surga Merah karya Arafat Nur: Studi kekuasaan Michel Foucault. *Syntax Idea*, 5(10), 1368-1385. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i10.2506>
- Jumiati, W. S., Udu, S., & Ibrahim, I. (2024). Relasi Kuasa dalam Novel Tanah Bangsawan Karya Filiananur. *Jurnal Pendidikan Bahasa*, 13(1), 1-10.
- Kebung, K. (2017). Membaca 'kuasa' michel foucault dalam konteks 'kekuasaan' di indonesia. *Melintas*, 33(1), 34-51. <http://dx.doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>
- Kusuma, S. S. K., & Sudikan, S. Y. (2023). Relasi Kuasa dalam Novel Gadis Kretek Karya Ratih Kumala: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault.
- Latupeirissa, E., & Tjahjono, T. (2021). Relasi Kekuasaan, Pengetahuan Dan Moral Tokoh Bujang Dalam Novel Pulang Karya Tere Liye (Kajian Relasi Kuasa Michel Foucault). *SASTRANESIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 9(4), 17-29. <https://doi.org/10.32682/sastranesia.v9i4.2195>
- Mudhoffir, A. M. (2013). Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Sosiologi Masyarakat* Vol 18.
- Nasution, S. Y. (2024). Relasi Kuasa Dalam Novel Rindu Kubawa Pulang Karya S. Baya: Analisis Wacana Kritis Michel Foucault. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 3(1), 196-216.
- Nafila, R. A. (2021). Analisis Wacana Kritis Film Little Women Karya Greta Gerwig Berdasarkan Perspektif Michel Foucault. *Basastra: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(2), 333-349. <https://doi.org/10.20961/basastra.v9i2.54570>
- Nensilanti, dkk, (2023). Ancaman Otoritas Belanda Terhadap Pribumi Yang Prokemerdekaan Dalam Novel Rindu Karya Tere Liye: Kajian Poskolonial Edward. *Totobuang*, 11(2), 217-230. <https://doi.org/10.26499/totobuang.v11i2.467>
- Sugiyono, S. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta, 1(11).
- Sholikhah, A. (2020). Relasi Dan Resistensi Kuasa Dalam Novel Orang-Orang Oetimu Karya Felix K. Nesi: Kajian Kekuasaan Michel Foucault. *Jurnal Bapala Fbs Unesa*, 7.
- Susanti, R. E., & Rengganis, R. (2022). Relasi Kuasa dalam Novel the Rise of Majapahit Karya Setyo Wardoyo: Perspektif Michel Foucault.